

## Perspektif Pengajaran Sejarah di Indonesia<sup>1</sup>

Sumardiansyah Perdana Kusuma<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Presiden/Ketua Umum Asosiasi Guru Sejarah Indonesia

Email: <sup>1</sup>sumardiansyahperdana@gmail.com

### Abstrak

Berbicara mengenai sejarah, maka kita dapat melihatnya melalui dua dimensi, yaitu dimensi ilmu dan dimensi pengajaran. Dimensi ilmu dibangun dari sebuah metodologi yang bertujuan untuk mencari, menemukan, dan menyampaikan kebenaran secara apa adanya. Sedangkan dimensi pengajaran dibangun dari pertimbangan-pertimbangan terutama berkaitan dengan nilai-nilai ideologis yang dianut oleh sebuah negara. Tampak terjadi persinggungan disini ketika sesuatu yang seharusnya disampaikan secara apa adanya, namun justru tidak tersampaikan dikarenakan ada pertimbangan tertentu. Situasi yang semula objektif malah bergeser menjadi subjektif, demikian kita bisa menafsirkan hal tersebut. Dalam pandangan esensialis sejarah diarahkan untuk pengembangan aspek intelektual semata, tujuan pengajaran sejarah yang mengarah kepada nilai-nilai dianggap sebagai pencemaran terhadap kemurnian sejarah.

Mengenai pengajaran sejarah maka tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru sejarah, yang secara profesi tugasnya adalah melakukan diseminasi berkenaan dengan konten materi sejarah sebagaimana termuat dalam kurikulum. Daya jangkau serta pengaruh official history yang menggunakan saluran pendidikan lebih nyata daripada alternative history yang biasanya tersebar pada lingkup yang terbatas berupa hasil-hasil penelitian sejarawan yang kadang agak sulit untuk diakses oleh publik.

**Kata Kunci :** *perspektif pengajaran sejarah di Indonesia*

### Abstract

Talking about history, we can see it through two dimensions, namely the dimension of science and the dimension of teaching. The dimension of knowledge is built from a methodology that aims to find, find, and convey the truth as it is. Whereas the teaching dimension is built from considerations mainly related to ideological values held by a country.

There appears to be an intersection here when something is supposed to be delivered as is, but it is not conveyed because there are certain considerations. The situation that was originally objective even shifted to subjective, so we can interpret that. In the historical essentialist view directed at the mere development of intellectual aspects, the purpose of teaching history that leads to values is considered to be a pollution of the purity of history.

Speaking of the teaching of history, it cannot be separated from the existence of a history teacher, whose profession is the task of disseminating information regarding the content of historical material as contained in the curriculum. The reach and influence of official history using educational channels are more evident than alternative history, which is usually spread over a limited scope in the form of the results of historian research, which is sometimes rather difficult for the public to access.

**Keywords:** *perspective of teaching history in Indonesia*

---

<sup>1</sup>Tulisan ini telah disampaikan dalam Diskusi Terpumpun tentang Strategi Pembudayaan Nilai Pancasila dengan Pendekatan Budaya bagi para Pendidik Pancasila, Direktorat Pembudayaan BPIP RI, bertempat di Hermitage Hotel Jakarta, 20 Oktober 2019.

## Pendahuluan

### Quo Vadis Official History Dan Alternative History

Pada Kongres Sejarah Nasional I tanggal 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta Mohammad Yamin memberikan pandangan mengenai filsafat sejarah nasional dalam penulisan sejarah nasional. Sebagai sebuah bangsa yang baru memasuki alam kemerdekaan dan sedang membangun jatidiri, negara perlu ambil bagian dalam membentuk ideology masyarakat sehingga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Pandangan Mohammad Yamin mendapatkan tanggapan dari Sujatmoko yang menjelaskan bahwa sebagai sebuah ilmu, sejarah harus terpisah dari filsafat dan menjauhkan diri dari berbagai pengaruh ideologi.

Secara realis pandangan Mohammad Yamin mempengaruhi para penguasa dimana sejarah dapat digunakan sebagai alat legitimasi dengan memproduksi narasi-narasi atau memberikan penafsiran atas sebuah peristiwa yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah (*official history*). Sedangkan pandangan Sujatmoko mempengaruhi para sejarawan yang bergerak di bidang keilmuan untuk terus melakukan riset dan menghasilkan penulisan sejarah dengan berbagai macam penafsirannya (*alternative history*). Implementasinya dilapangan, *official history* berkaitan dengan pengajaran sejarah, sebab pengajaran sejarah adalah bagian dari system kurikulum yang dibuat dan diputuskan oleh pemerintah. Berbicara pengajaran sejarah maka tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru sejarah, yang secara profesi tugasnya adalah melakukan diseminasi berkenaan dengan konten materi sejarah sebagaimana termuat dalam kurikulum. Daya jangkau serta pengaruh *official history* yang menggunakan saluran pendidikan lebih nyata daripada *alternative history* yang biasanya tersebar pada lingkup yang terbatas berupa hasil-hasil penelitian sejarawan yang kadang agak sulit untuk diakses oleh publik.

Quo vadis antara pemerintah (*official history*) dan sejarawan (*alternative history*) menempatkan guru sejarah ditengah pusaran. Pada satu sisi dia bisa saja condong ke salah satu, diambang kebingungan, atau justru bermain diantara keduanya? Dalam bidang ilmu sejarah

ketidaksesuaian antara narasi dan tafsir yang dibangun oleh pemerintah dengan narasi dan tafsir yang dibangun oleh sejarawan atas sebuah peristiwa sejarah akan melahirkan apa yang disebut sejarah kontroversial. Sedangkan dalam bidang pengajaran sejarah akan menghadirkan kerancuan pemahaman dalam diri peserta didik sehingga dikhawatirkan menghambat pencapaian tujuan pendidikan

Guru sejarah perlu menguasai *Pedagogical Content Knowledge* yaitu pengetahuan tentang materi dan bagaimana cara mengajarkannya. *Pedagogical Content Knowledge* merupakan solusi yang bisa diaktualisasikan guru dalam menghadapi quo vadis antara pemerintah (*official history*) dan sejarawan (*alternative history*).

### Guru Sejarah dan Mata Pelajaran Sejarah

Dewasa ini profesi guru bermakna strategis, karena penyandang profesi guru mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa<sup>2</sup>. Tanggal 2 Desember 2004 pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono guru dicanangkan sebagai profesi, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tepat satu tahun setelahnya. Dalam regulasi itu Guru diterjemahkan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat

Bagi Sukarno, menjadi guru adalah hal yang mulia, menjadi guru tidak hanya dapat dikatakan sebagai mengabdikan kepada bangsa dan negara, tidak hanya dapat dikatakan sebagai menjemput sebuah kehormatan, tidak hanya dapat dikatakan sebagai menuntaskan cita-cita kemerdekaan, tetapi menjadi guru adalah menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. "Hanya guru yang benar-benar Rasul Kebangsaan yang dapat membawa sang anak kedalam alam kebangsaan. Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangsaan yang

dapat menurunkan kebangunan dalam jiwa sang anak”. Menjadi guru laksana utusan Tuhan yang dikirim ke atas muka bumi untuk menyadarkan, membangkitkan dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam diri setiap manusia.

Pada konteks ini kita akan berbicara mengenai guru sejarah, sejarah, dan mata pelajaran sejarah. Guru sejarah merupakan ujung tombak yang mewariskan peradaban bangsa melalui ruang-ruang kelas. Posisinya sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan peserta didik yang notabene adalah calon pewaris yang akan melanjutkan kehidupan bangsa di masa sekarang maupun masa akan datang. Bicara peradaban erat kaitannya dengan karakter kebangsaan (pola perilaku masyarakat yang ada di dalamnya). Karakter dan peradaban menggambarkan identitas serta eksistensi dari sebuah bangsa. Menarik jika mencermati bahwa pendidikan nasional kita sebenarnya memiliki “platform karakter- peradaban” sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disana dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memiliki beberapa tujuan antara lain: membangun dan membekali peserta didik dengan jiwa Pancasila, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama penyelenggaraan pendidikan, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi seluruh stake holder dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Dimensi penguatan karakter juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia yang memberikan sebuah cara pandang bahwa kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa.

Kebudayaan yang dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun hingga berujung terbentuknya sebuah karakter bangsa.

Sejarah merupakan cerita mengenai pengalaman kolektif suatu komunitas atau bangsa di masa lampau. Pengalaman membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya. Dalam konteks kebangsaan adanya pengalaman kolektif (sejarah masa lampau) akan turut serta melahirkan kepribadian dan identitas nasional. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya<sup>4</sup>.

Sejarah dalam dimensi keilmuan berisikan kajian mengenai kehidupan manusia. Selama ini orang selalu terpaku pada kajian-kajian ilmu alam, sehingga banyak yang berpikir sekarang adalah masa kejayaan sains. Padahal ditengah perkembangan Revolusi 5.0 kedudukan ilmu sosial juga patut diperhatikan, ambil contoh jika ilmu eksak mampu menghasilkan penemuan alat-alat canggih, maka peran ilmu humaniora adalah membentuk manusia-manusia beradab dan memiliki nilai-nilai sosial tinggi agar penciptaan serta penggunaan alat digunakan untuk menunjang peradaban manusia. Sejarah merupakan fondasi dari semua ilmu humaniora. Mempelajari sejarah sama artinya dengan mempelajari kehidupan, terutama kehidupan manusia di tengah masyarakat dan zamannya. Tidak ada ilmu apapun yang lebih bermanfaat selain sejarah yang memang sangat diperlukan. Beberapa bukti tentang peningkatan kesadaran akan hal ini dapat dilihat dari peningkatan minat masyarakat yang luar biasa dalam membaca sejarah (Rowse, 2014: vii).

Secara historis, setiap bangsa memiliki akar sejarah yang menceritakan dari mana dan bagaimana bangsa itu terbentuk, berkembang, dan menentukan identitas dirinya. Pembentukan suatu bangsa dan kehidupan kebangsaannya adalah hasil dari suatu proses realisasi aspirasi dan perjuangan masyarakat dengan segala tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan aspirasi tersebut. Generasi sekarang adalah pelanjut perjuangan dan dengan demikian mereka harus mengetahui apa yang sudah dilakukan generasi sebelumnya. Pengetahuan

tentang apa yang sudah dilakukan generasi sebelumnya dan kajian terhadap tantangan yang dihadapi kehidupan bangsa pada masa kini menjadi pengetahuan yang penting bagi para penerus. Pengetahuan tentang kehidupan manusia di masa lampau hanya dapat diperoleh dari ilmu sejarah, dan keduanya dipelajari generasi muda melalui mata pelajaran sejarah.

Mata pelajaran sejarah berisikan pelajaran penting bagi umat manusia dari masa ke masa. Posisi penting ini dilandasi oleh kenyataan bahwasanya sejarah diyakini mampu mengajarkan pengalaman masa lalu yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masa kini dan masa depan, sebagaimana ungkapan Cicero bahwa sejarah adalah guru kehidupan (*Historia Magistra Vitae*). Melalui mata pelajaran sejarah, kegemilangan (Perennialisme) masa lalu kita sebagai sebuah bangsa yang melahirkan sebuah eksistensi dan kepercayaan diri dapat diceritakan. Mata pelajaran sejarah juga berperan sebagai media pendidikan politik yang dapat mempersatukan bangsa. Sejarah menjadi saksi mengenai awal mula kehadiran bangsa dan negara, bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, serta menjaga keutuhannya hingga dewasa ini.

Urgensi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum dilandasi pula oleh kemampuan konten mata pelajaran sejarah dalam mengembangkan berbagai potensi dasar peserta didik sebagai manusia. Wineburg mengatakan *“historical knowledge should serve as a bank of contemplating present problems (Wineburg, 2001:11)”*. Cerita sejarah sangat iluminatif tentang upaya manusia menjawab tantangan yang mereka hadapi dan media yang sangat baik untuk mengembangkan inspirasi, kreativitas, inisiatif, dan kemampuan berpikir antisipatif. Kemampuan sejarah sebagai media mata pelajaran dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut disebabkan karena sejarah berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia di masa lampau yang terus berlanjut ke masa kini dan masa mendatang. Apa yang telah dilakukan manusia di masa lalu dan tersaji dalam cerita sejarah adalah merupakan bagian dari kehidupan generasi muda masa kini dan generasi masa mendatang. Kontinum pengalaman seperti ini tidak mungkin

tersaji dan dapat dilakukan oleh mata pelajaran lainnya.

Mempelajari sejarah melalui mata pelajaran sejarah juga dapat dilihat sebagai upaya memperkenalkan disiplin ilmu sejarah terhadap generasi muda. Mengenai cara berpikir sejarah (diakronik dan sinkronik), serta bagaimana sejarawan bekerja dalam menerapkan prinsip-prinsip penelitian sejarah (heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi). Kita ingin melalui ilmu sejarah narasi sejarah bangsa dapat dituliskan secara objektif dengan berpijak pada metodologi dan fakta-fakta yang jelas.

### Sejarah Perkembangan Mata Pelajaran Sejarah di Indonesia

Pengertian mata pelajaran menurut Kamus Besar adalah pelajaran yang diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan<sup>5</sup>. Mata pelajaran merupakan bentuk organisasi konten kurikulum, tetapi mata pelajaran itu sendiri bukan kurikulum<sup>6</sup>. Sebagai bagian dari kurikulum, mata pelajaran digunakan sebagai sarana untuk menggabungkan berbagai jenis pengetahuan yang dianggap memiliki keterdekatan. Penggabungan berbagai jenis pengetahuan ini diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh peserta didik dalam rangka menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Sejarah perkembangan mata pelajaran sejarah di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kurikulum. Posisi mata pelajaran sejarah baik tersirat maupun tersurat dapat dilihat dari kurikulum yang diterapkan. Perhatian dan cara pandang pemerintah dalam melihat sejarah ditentukan oleh dinamika politik dan orientasi pembangunan rasional. Pada masa awal kemerdekaan Ki Hajar Dewantara menyakini bahwa pendidikan sejarah merupakan alat strategis dalam membangun alat kesadaran kebangsaan. Pandangan ini diwujudkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi sebuah kebijakan politik setelah dirinya menjabat Menteri PPK yang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu Ki Hajar Dewantara meletakkan landasan konsep pendidikan berbasis kebudayaan yang mengutamakan patriotism.

Setelah Ki Hajar Dewantara, Menteri PPK S. Mangunsarkoro menekankan pentingnya mata pelajaran sejarah dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum diberikan

sejak SD. Di SMP dan SMA dikenal adanya mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Khusus peserta didik SMA jurusan sastra dan budaya, mata pelajaran sejarah ditambah dengan sejarah kebudayaan. Hal ini sejalan dengan filosofi perrenialisme yang bertujuan untuk mengembangkan rasa bangga terhadap prestasi atau kejayaan bangsa pada masa lampau. Secara tersurat pemerintah mengamanatkan agar peristiwa-peristiwa yang dapat dibanggakan dan menunjukkan kejayaan bangsa Indonesia harus ditegaskan dengan se jelasnya.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 substansi kurikulum bergerak mengikuti kehendak politik pemerintah yang memanfaatkan pendidikan sebagai Indokrinisasi. Materi Indokrinisasi berasal dari pemikiran Presiden Sukarno dalam Amanat Negara 17 Agustus 1959 tentang penemuan kembali Revolusi kita, Keputusan Dewan Pertimbangan Agung Sementara No. 3/Kpts/Sd/II/1959. Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1960 tentang Penemuan kembali Revolusi Kita, TAP MPRS No. 1/MPR/1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Amanat Pembangunan Presiden 28 Agustus 1959, dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional. Sejumlah materi doktrin itu mengarahkan kurikulum sebagai alat Revolusi menentang imperialism, neokolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Melalui instruksi Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 1961 diperkenalkan Civics sebagai mata pelajaran baru yang bertujuan membentuk manusia baru sesuai ajaran Manipol-Usdek.

Posisi mata pelajaran sejarah mulai dari Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, dan Kurikulum 1968 tidak mengalami perubahan. Di jenjang SD peserta mempelajari mata pelajaran sejarah, sedangkan di jenjang SMP dan SMA peserta didik mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia dan mata pelajaran sejarah dunia. Berlanjut sampai Kurikulum 1975 dimana Visi pendidikan pemerintah orde baru saat itu adalah membentuk masyarakat pancasilais yang dibangun berdasarkan demokrasi pancasila. Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan diarahkan untuk menangkal ajaran

komunisme serta berperan sebagai pedoman masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Keberadaan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang baru diperkenalkan mengubah posisi mata pelajaran sejarah dalam struktur Kurikulum 1975. Mata pelajaran sejarah pada masa jenjang SD dan SMP disatukan menjadi bagian dari mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Nomenklatur baru mata pelajaran sejarah diperkenalkan oleh pemerintah dalam Kurikulum 1984, yakni Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 menetapkan PSPB sebagai mata pelajaran wajib dari jenjang SD, SMP, sampai SMA. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR 1983 PSPB menjadi bagian dari Pendidikan Pancasila. Pendidikan pancasila terdiri dari komponen antara lain Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), PMP, dan PSPB. Kehadiran PSPB sebagai mata pelajaran tambahan tidak mengubah posisi mata pelajaran IPS di SD dan SMP, serta mata pelajaran sejarah di SMA. Meninggalnya Nugroho Notosusanto, ditambah kritikan-kritikan yang muncul, pada tahun 1986 PSPB dihapuskan.

Cita-cita membangun negara industri mengubah paradigma sistem pendidikan nasional yang semula berbasis kebudayaan (UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954) menjadi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 2 Tahun 1989). Perubahan paradigma ini menegaskan bahwa bangsa yang maju dan besar adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum tahun 1994 mata pelajaran sosiologi dan antropologi mendapatkan tempat di kurikulum sebagai mata pelajaran yang masing-masing berdiri sendiri. Di sisi lain pemerintah menambah jumlah jam mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta mengurangi jam pelajaran mata pelajaran sejarah di SMA.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap mata pelajaran sejarah berlanjut dari Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, sampai Kurikulum 2006. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia dihadapan pada isu kehilangan karakter. Sehingga di dengungkanlah pendidikan

karakter agar masuk ke dalam kurikulum. Ironis, karena sesungguhnya pembentukan nilai-nilai karakter bangsa sudah menjadi bagian dari mata pelajaran sejarah itu sendiri.

Pemerintah akhirnya menyadari peran mata pelajaran sejarah sebagai sarana pembentukan nilai-nilai karakter bangsa. Pemberlakuan Kurikulum 2013 menempatkan sejarah sebagai mata pelajaran penting. Posisi sejarah secara pedagogis layak mendapatkan tempat dalam kurikulum. beberapa alasan yang bisa menjelaskan itu antara lain: (1) sejarah memuat pelajaran penting bagi umat manusia dari masa ke masa; (2) sejarah sebagai jawaban untuk mempersiapkan kehidupan bangsa di masa kini dan masa depan, sambil berpijak pada identitas yang dibangun di masa lalu; (3) sejarah dimaknai sebagai upaya mewariskan kemegahan dan kejayaan bangsa di masa lalu kepada generasi muda; (4) sejarah merupakan media politik yang ampuh, membentuk memori kolektif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara; (5) sejarah dapat mengembangkan berbagai potensi dasar dalam diri manusia, seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir imajinatif, berpikir diakronik, berpikir sinkronik, kesadaran diri, membuat dan mengambil keputusan, mengutarakan pendapat, retorika, menulis, dan lain-lain; (6) sejarah memperkenalkan peserta didik kepada salah satu pendekatan keilmuan, yaitu ilmu sejarah.

### **Pergulatan Visi Kurikulum Pendidikan Sejarah 1945-2013**

Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa kurikulum pendidikan sejarah merupakan alat strategis dalam membangun kesadaran berbangsa, apalagi pasca proklamasi Indonesia dapat diistilahkan sebagai bayi yang baru lahir. Pandangan ini diwujudkan oleh Ki Hajar menjadi sebuah kebijakan politik setelah dirinya menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) yang pertama pada 19 Agustus 1945 beliau meletakkan landasan konsep pendidikan berbasis kebudayaan yang mengutamakan patriotisme.

Menteri PPK Muhammad Yamin (30 Juli 1952 - 12 Agustus 1955) memperkuat legalitas UU No. 4 Tahun 1950<sup>11</sup> dengan mengajukan pembahasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada 27 Januari 1954

pimpinan DPR menyetujui pemberlakuan kembali UU No. 4 Tahun 1950 tanpa perubahan. Hasil persetujuan DPR ini disahkan oleh Presiden Soekarno pada 12 Maret 1954 menjadi UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan

Berlakuknya UU No. 4 Tahun 1950. Konsep pendidikan berbasis kebudayaan tersebut menempatkan pendidikan sejarah sebagai pendidikan yang penting karena dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri generasi muda Indonesia. Secara tersurat UU No. 4 Tahun 1950 mengamanatkan agar “peristiwaperistiwa yang dapat dibanggakan dan menunjukkan kejayaan bangsa kita harus ditegaskan dengan se jelasnya.” Amanat ini menyimpulkan bahwa visi pertama kurikulum pendidikan sejarah Indonesia dibangun berdasarkan filosofi perennialisme yang mengarahkan kurikulum pendidikan sejarah untuk mengembangkan rasa bangga generasi muda terhadap prestasi bangsanya pada masa lalu.

Sesuai amanat UU No. 4 Tahun 1950, pengembangan visi kurikulum pendidikan sejarah diarahkan untuk membentuk masyarakat demokratis. Berdasarkan amanat ini maka rancangan visi kurikulum pendidikan sejarah juga dilandasi filosofi Rekonstruksi Sosial, memandang sejarah tidak hanya sebatas masa lalu, tetapi masa kini dan masa depan.

Usai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 substansi kurikulum pendidikan sejarah Indonesia bergerak mengikuti kehendak politik pemerintah yang memanfaatkan pendidikan sebagai indoktrinasi. Materi indoktrinasi berasal dari pemikiran Presiden Soekarno dalam Amanat Negara 17 Agustus 1959 tentang Penemuan Kembali Revolusi Kita, Keputusan Dewan Pertimbangan Agung Sementara No.3/Kpts/Sd/II/1959, Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1960 tentang Djalannya Revolusi Kita (Djarek), TAP MPRS No. 1/MPR/1960 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Amanat Pembangunan Presiden pada 28 Agustus 1959, TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional. Sejumlah materi doktrin tersebut menggiring kurikulum pendidikan sejarah sebagai alat revolusi menentang imperialisme, neokolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Pemerintah dalam hal ini Menteri PPK Priyono mendukung fungsi kurikulum pendidikan sejarah

sebagai alat indoktrinasi. Tahun 1964 diberlakukan Kurikulum Pancawardhana. Dalam kurikulum ini visi pendidikan sejarah bersifat Proklamasi-sentris dan bereskatologi masyarakat sosialis yang dibangun berdasarkan kepentingan politik dan filosofi Perrenialisme serta Rekonstruksionisme Sosial. Proses pembentukannya diwarnai pergulatan antara visi pendidikan sejarah yang diajukan Partai Komunis Indonesia (PKI)<sup>12</sup> dengan yang diajukan Tentara Nasional Indonesia -Angkatan Darat

Tahun 1968 diterapkan kurikulum transisi 1968, substansi kurikulum pendidikan sejarah berubah disesuaikan dengan perspektif sejarah dari pimpinan TNI-AD. Pengaruh kepentingan politik membuat visi kurikulum pendidikan sejarah dalam kurikulum transisi tahun 1968 lebih menekankan rekonstruksionisme sosial daripada perrenialisme. Visi kurikulum pendidikan sejarah dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan politik untuk menopang kekuasaan pemerintah Orde Baru.

Kurikulum 1975 merupakan fondasi kebijakan pendidikan yang sangat kokoh terutama dalam konteks kurikulum pendidikan sejarah karena pemerintah Orde Baru berhasil menerbitkan enam jilid buku Sejarah Nasional Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan visi pemerintah Orde Baru tentang masa lalu. Visi ini dibangun untuk mengendalikan memory collective bangsa Indonesia. Masyarakat ideal yang dicita-citakan adalah membentuk masyarakat Pancasila yang dibangun berdasarkan demokrasi Pancasila.

Nomenklatur baru mata pelajaran sejarah diperkenalkan pemerintah Baru dalam Kurikulum 1984, yakni Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Substansi kurikulumnya dibangun berdasarkan landasan filosofi perrenialisme, menghidupkan kembali ingatan akan nilai-nilai perjuangan bangsa dimasa lampau. Meninggalnya Nugroho Notosusanto, ditambah kritikan-kritikan yang muncul, pada tahun 1986 PSPB dihapuskan.

Cita-cita membangun negara industri mengubah konsep sistem pendidikan nasional yang semula berbasis kebudayaan (UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954) menjadi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi / Iptek (UU No 2 Tahun 1989). Perubahan basis pendidikan ini mempengaruhi penurunan

kedudukan pendidikan sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional hingga terpinggirkan karena dinilai tidak dapat membawa bangsa Indonesia meraih kemajuan. Menjelang berakhirnya PJPT I berkembang pandangan bahwa bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang menguasai Iptek. Oleh karena itu pemerintah menambah jumlah jam pelajaran mata pelajaran matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan mengurangi jam pelajaran pendidikan sejarah. Terpengaruh pandangan ini, konseptor pendidikan sejarah dalam kurikulum 1994 menggunakan filosofi esensialisme, kurikulum pendidikan sejarah diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualitas.

Pendidikan sejarah dalam kurikulum 1994 kehilangan arah sehingga tidak mempunyai visi yang kuat. Kehilangan arah berlanjut setelah pemerintah Orde Baru berakhir pada 21 Mei 1998. Pada era reformasi visi kurikulum pendidikan sejarah yang bersifat antikomunis dihilangkan. Aksi protes menolak penghilangan antikomunis segera bermunculan dan mendapatkan dukungan parlemen dan pemerintah baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo membatalkan pemberlakuan kurikulum 2004 dan menggantinya dengan kurikulum 2006. Kedua kurikulum ini mempunyai dasar hukum yang sama, yakni UU No. 20 Tahun 2003 yang memasukan pendidikan sejarah sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial / IPS (pasal 37 ayat 1). Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bahan kajian IPS dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Pada kurun waktu ini bangsa dihadapkan pada realitas negatif, disimpulkan bahwa bangsa ini kehilangan karakter, maka didengungkanlah pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan. Ironis, karena sesungguhnya nilai-nilai karakter menjadi bagian dari peran pelajaran sejarah itu sendiri.

Pada kurikulum 2013, pemerintah akhirnya menyadari peran pelajaran sejarah sebagai sarana pembentukan karakter positif, nations and character building, terutama di era globalisasi. Pelajaran sejarah diberikan dalam dua kategori yaitu sejarah Indonesia berlandaskan

Perennialisme, sejarah yang bertujuan menanamkan rasa bangga atas perjalanan bangsa dimasa lampau. Pada kelompok peminatan, sejarah yang diberikan berlandaskan essentialisme dan rekonstruksi sosial, sejarah diajarkan dengan pendekatan keilmuan serta mengambil orientasi ke masa depan.

### Pendekatan dan Strategi Pembelajaran

Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai quo vadis antara *official history* dengan *alternative history* yang bisa melahirkan sejarah kontroversi (*controversial history*). Persoalan Sejarah Pancasila bisa menjadi contoh bagaimana narasi mengenai Pancasila terdapat perdebatan didalamnya. Sebagian sepakat dengan Pancasila versi 1 Juni 1945, sebagian lagi mendukung Pancasila versi 22 Juni 1945, sedangkan sisanya memandang Pancasila yang otentik adalah Versi 18 Agustus 1945. Dalam kepentingan praktis di ruang-ruang kelas, Guru Sejarah perlu memperkuat wawasan kesejarahan dan keterampilan pedagogic agar pembelajaran sejarah menjadi bermakna.

Beberapa pendekatan yang ditawarkan dalam mengajarkan sejarah kontroversi antara lain, (1) *exclusive neutrality*; guru tidak membahas dan memperkenalkan materi sejarah kontroversi, (2) *exclusive partiality*; guru memperkenalkan dan membela salah satu versi saja, (3) *neutral impartiality*; guru memperkenalkan materi kontroversi, tetapi menghindari untuk menjelaskan secara spesifik, (4) *committed impartiality*; guru memperkenalkan, membahas, dan mendiskusikan materi sejarah kontroversi kepada peserta didik. Guru yang baik dan berkompeten tentunya harus mampu memosisikan diri dan memilih pendekatan *committed impartiality* di dalam mengajarkan materi sejarah kontroversi.

Jika guru sudah berkomitmen untuk mengajarkan materi sejarah kontroversi, maka ada beberapa strategi alternative yang bisa dijalankan yaitu, (1) *committed*; guru menyampaikan (hanya) satu versi materi sejarah kontroversi yang diyakini untuk di diskusikan, (2) *objective*; guru menjelaskan seluruh versi tanpa mengemukakan pendapat pribadinya, (3) *devils advocate*; guru mengambil peran atau posisi yang berlawanan dengan pendapat peserta didik, hal ini untuk memancing dialog atau diskusi, (4)

*advocate*; guru menampilkan seluruh versi dan memberikan kesimpulan dari (salah satu) versi yang di dukung, dan mempersilahkan peserta didik memberikan penilaian, (5) *impartial chairperson*; guru menstimulus peserta didik, agar mereka mampu memunculkan versi-versi yang berbeda dalam proses dialog atau diskusi, (6) *declared interest*; guru menjelaskan salah satu versi untuk dikritisi kemudian diinvestigasi oleh peserta didik. Guru bisa memilih diantara strategi yang ditawarkan, semua tergantung tujuan yang ingin dicapai dan melihat kondisi peserta didik disekolah masing-masing. Yang jelas sebagai fasilitator guru harus mampu menampilkan cara pandang yang apa adanya (*objective*), logis (masuk akal), neutral (tidak tendensius), *balance* (seimbang) dan berpijak pada data dan fakta yang jelas (*reason*).

### Daftar Pustaka

- Bunga Rampai Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 1999. 1999. Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Adam, Asvi Warman. 2007. Seabad Kontroversi Sejarah. Jogjakarta: Ombak.
- Frederick H. William dan Soeri Soeroto (Penyunting). 2005. Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES.
- A.L. Rowse. Apa Guna Sejarah?. 2014. Depok: Komunitas Bambu.
- Adam, Warman, Asvi. 2007. Pelurusan Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Anderson, Lorin W. Dan Krathwohl, David R. 2015. Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Annarino, Anthony A. 1980. Curriculum Theory and Design in Physical Education. Missouri: The C.V. Mosby Company.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2011. Naskah Akademik Pendidikan Sejarah

- untuk Kurikulum SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2016. Pembelajaran dan Penilaian Mata Pelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2013 SMA/MA. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hastuti, Elly. Peningkatan Kesadaran Sejarah Siswa Melalui Pemanfaatan Sumber Belajar Isu Kontroversi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 2 Agustus 2008.
- Hasan, Hamid. 2012. Pendidikan Sejarah Indonesia Isu dalam Ide dan Pembelajaran. Bandung : Rizqi Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kochhar, S.K. 2008. Pembelajaran Sejarah (terjemahan Purwanta dan Yovita Hardiati). Jakarta : PT. Grasindo. Naskah Akademik Kurikulum 2013 Mata pelajaran Sejarah, Balitbang, Kemendikbud
- Rachmah, Huriyah. 2014. Pengembangan Profesi Pendidikan IPS. Bandung: Alfabeta.
- Surya, M. 2004. Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Supardan, Dadang. 2011. *Pengembangan Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Sejarah*; Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sejarah. Bandung: Laboratorium Jurusan Pendidikan sejarah FPIPS UPI.
- Syukur, Abdul. *Pergulatan Visi Pendidikan Sejarah Indonesia (1945-2013)*. Makalah Disampaikan dalam *International Seminar on Social, Politics, History, and Education for Schools and Societies, December 1-2 2014* Yogyakarta, *Organized by: History Education Department Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University*
- Syukur, Abdul. *Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004 Sebuah Stabilitas yang Dinamis*. Depok : Disertasi Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Sejarah UI, 2013.
- Tim Penyusun Pedoman Bahan Ajar Sejarah Bagi Guru Sekolah Menengah (SMU/MA,SMK). *Kurikulum 1994 Suplemen GBPP Mata Pelajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Wineburg, Sam. 2001. *Historical Thinking and Other Unnatural Acts : Charting the future of Teaching the Past*. Philadelphia : Temple University Press.
- [www.http://sejarahkritis.wordpress.com/2012/10/16/mengajarkan-isu-kontroversial](http://sejarahkritis.wordpress.com/2012/10/16/mengajarkan-isu-kontroversial) diakses pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2019 jam 7.55 WIB.